

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kasus dugaan ijazah palsu Jokowi pertama kali muncul pada tahun 2022, ketika Bambang Tri Mulyono, seorang wartawan dan penulis, mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan tersebut berisi dugaan ketidakabsahan ijazah Jokowi yang menjadi salah satu syarat pencalonan dalam pemilihan Presiden. Dalam gugatannya, Bambang mempersoalkan keaslian dokumen pendidikan yang digunakan Jokowi sejak pencalonan hingga menjabat sebagai Presiden. Berbagai pihak mulai menaruh perhatian, baik dari kalangan pendukung maupun pihak oposisi terhadap pemerintahan Jokowi.

Situasi menjadi lebih kompleks karena gugatan ini memantik reaksi dari sejumlah universitas, lembaga pendidikan, dan otoritas terkait yang berupaya melakukan klarifikasi guna melindungi reputasi institusi mereka, sementara tim kuasa hukum Jokowi pun aktif membantah dan menyajikan bukti keabsahan ijazah yang dipersoalkan. Di tengah riuhnya pemberitaan dan opini publik, beragam narasi berkembang melalui media *online* dan cetak, dengan sejumlah media mengupas aspek legalitas, prosedur administrasi, hingga kemungkinan motif politik di balik munculnya kembali isu ini. Meski demikian, proses hukum yang berjalan tidak mampu menghadirkan bukti kuat yang dapat menguatkan tuduhan tersebut. Pada akhirnya, kasus ini mereda karena Bambang mencabut gugatannya akibat kesulitan dalam proses pembuktian (Detik, 2022).

Gugatan-gugatan mengenai ijazah palsu Jokowi semakin bermunculan dari tahun ke tahun. Pada tanggal 14 April 2025 kelompok pengacara yang tergabung dalam Tolak Ijazah Palsu Usaha Gakpunya Malu (TIPU UGM) mengajukan gugatan terhadap keabsahan ijazah Jokowi di Pengadilan Negeri Surakarta, gugatan ini diajukan oleh Muhammad Taufiq atas dugaan perbuatan melawan hukum. Kontroversi ini tidak hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga mengundang perdebatan politik yang luas di masyarakat. Berbagai pihak, mulai dari akademisi, politisi, hingga aktivis, terlibat dalam diskusi publik mengenai validitas tuduhan tersebut. Isu ini menjadi viral di media sosial dan memicu polarisasi opini publik yang cukup tajam antara pendukung dan kritik terhadap Jokowi (JDIH, 2025).

Dua media besar Indonesia, CNN Indonesia dan Republika, memberikan pemberitaan yang intensif terhadap kasus ini. CNN Indonesia merupakan media *online* mainstream dengan jangkauan nasional yang luas. Survei yang dilakukan oleh Reuters Institute menyebutkan bahwa CNN Indonesia berada pada tingkat nomor 5 portal berita terpopuler di Indonesia dengan pengguna mingguan sebesar 25% dari total responden (Newman & Fletcher, 2024). CNN Indonesia hadir sebagai media yang menyampaikan fakta berdasarkan data dari realita yang ada, oleh karena itu bahasa dan gaya editorial CNN cenderung kaku, *to the point* dan tanpa bias. Dalam konteks kasus dugaan ijazah palsu mantan presiden, posisi dan karakter ini menjadikan setiap bingkai pemberitaan CNN Indonesia sangat berpotensi memengaruhi cara publik memahami dan menilai isu tersebut.

Salah satu berita yang diterbitkan oleh CNN Indonesia berjudul “*Polemik Panjang Ijazah Jokowi, Timbul Tenggelam Sejak 2019*” berisi penjelasan kronologi awal isu ini mencuat hingga ditahun 2025. Secara diksi, judul “Polemik Panjang Ijazah Jokowi, Timbul Tenggelam Sejak 2019” membentuk bingkai makna yang sangat spesifik. Kata “polemik” dalam KBBI berarti perdebatan mengenai suatu masalah yang dikemukakan secara terbuka di media massa, sehingga sejak awal isu ini sudah ditempatkan sebagai ranah debat publik, bukan dipandang langsung sebagai persoalan pembuktian hukum. Kata “panjang” menegaskan durasi yang lama, sehingga memberi kesan bahwa isu ini berlarut-larut dan telah melewati banyak fase. Sementara itu, frasa “timbul tenggelam” digunakan secara metaforis, “timbul” memiliki arti muncul atau naik ke permukaan, sedangkan “tenggelam” berarti hilang atau senyap. Gabungan keduanya menyiratkan bahwa isu ini tidak hadir sekali dan selesai, melainkan berulang kali muncul lalu mereda, sehingga perhatian pembaca diarahkan pada dinamika perdebatan, bukan pada substansi bukti yang dipersoalkan. Penggunaan diksi ini mencerminkan karakteristik isu berita yang berulang, sehingga khalayak mendapat paparan informasi yang bersifat pengulangan (*repeated information*) alih-alih informasi baru merupakan faktor utama yang memicu kelelahan audiens (*issue fatigue*) (Gurr & Metag, 2023).

Polemik Panjang Ijazah Jokowi, Timbul Tenggelam Sejak 2019

CNN Indonesia

Rabu, 16 Apr 2025 10:28 WIB

Bagikan:    



Sejumlah gugatan dilayangkan berbagai pihak yang mempertanyakan keabsahan ijazah pendidikan Presiden RI k-7 Joko Widodo sejak 2019. (CNN Indonesia/Tunggal)

Gambar 1 Pemberitaan Ijazah Palsu Jokowi pada CNN Indonesia

Pernyataan terakhir atau kesimpulan CNN Indonesia dalam isi berita tersebut juga memperkuat framing CNN Indonesia, “*Meski telah berkali-kali ditegaskan keasliannya oleh institusi pendidikan dan lembaga peradilan, isu ijazah Jokowi tampaknya belum akan reda dalam waktu dekat. Seiring dinamika politik dan opini di ruang publik, isu ini akan terus menjadi perdebatan.*” Pernyataan tersebut memiliki pesan tersirat bahwa kasus ijazah palsu Jokowi sudah selesai ketika keasliannya sudah diverifikasi oleh Lembaga atau institusi yang memiliki wewenang. CNN Indonesia memosisikan diri bahwa “kebenaran versi institusi” sudah final dan melalui penggunaan kata ‘berkali-kali’ CNN Indonesia membangun narasi bahwa keraguan yang tersisa bukan masalah terkait bukti, tetapi ketersediaan

pihak tertentu untuk menerima fakta hukum. Pendekatan ini mencerminkan karakteristik jurnalisme CNN Indonesia yang mengedepankan objektivitas dan hanya menyampaikan fakta tanpa bias, memposisikan diri agar tidak berperan sebagai penilai atau pengadil secara langsung (Muharrom, Radifan, & Feriyanti 2025).

Di sisi lain, Republika merupakan media yang memiliki keterikatan dengan nilai-nilai keagamaan islam. Sebagai media yang didirikan oleh ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia), Republika memiliki perspektif yang berbeda dalam melihat isu-isu politik dan sosial dibandingkan dengan media *mainstream* lainnya. Keterikatan ini membentuk *frame* atau bingkai pemberitaan yang khas, yang mana nilai-nilai dan sudut pandang Islam seringkali menjadi lensa utama dalam menganalisis suatu peristiwa. Secara demografis, target audiens Republika adalah kalangan Muslim yang peduli terhadap isu-isu keagamaan dan politik (Asa'ari, Iskandar, & Hainadri, 2023). Tercatat jumlah kunjungan situs Republika mencapai sekitar 88 juta kunjungan selama periode April–Juni 2025, sebuah indikator capaian audiens yang menunjukkan kapasitas media ini untuk menyebarkan *frame*-nya ke khalayak luas (AMSI, 2025).

Meskipun dugaan pemalsuan ijazah terhadap Jokowi tampak sebagai persoalan administratif-politik, sudut pandang ideologis Republika yang menekankan nilai-nilai keislaman mengaitkan permasalahan ini dengan nilai moral integritas kepemimpinan, khususnya nilai kejujuran (*siddiq*) dan dapat dipercaya (*amanah*) (Na'im, 2022). Dalam kerangka tersebut, isu ijazah tidak hanya

dipandang sebagai bukti administratif, melainkan juga sebagai ukuran etika moral seorang kepala negara yang pernah mengucapkan sumpah di hadapan Tuhan. Apabila terbukti bahwa seorang calon atau pejabat tertinggi sedari awal berbohong mengenai persyaratan administratif untuk mendapatkan jabatan, hal itu tidak hanya merugikan dan membohongi seluruh rakyat Indonesia tetapi juga menimbulkan keraguan atas kesahihan sumpah keagamaan yang diucapkannya. Konsekuensinya, legitimasi kebijakan dan keputusan hukum yang dihasilkan kepemimpinan tersebut berisiko dipertanyakan dan cacat secara hukum. Hal ini tercantum dalam berita yang diunggah Republika dengan judul *“Jika Ijazah Jokowi Palsu, Ia harus Menanggung Utang Rp 7.000 Triliun”*. Berita tersebut menyoroti Jokowi yang digugat oleh Tim Tipu UGM Usaha Gakpunya Malu (TIPU UGM) terkait dugaan pemalsuan ijazah di Pengadilan Negeri Solo. Isi berita tersebut lebih menyoroti pernyataan tim penggugat, terutama M Taufiq yang menjelaskan bahwa inti gugatan adalah pembuktian apakah ijazah yang digunakan sebagai modal pendaftaran sebagai presiden asli atau palsu, apabila pembuktian menunjukkan pemalsuan, penggugat menuntut konsekuensi finansial dan hukum yang sangat besar bagi yang bersangkutan.

Jika Ijazah Jokowi Palsu, Ia harus Menanggung Utang Rp 7.000 Triliun

Ijazah Jokowi di SMAN 6 Surakarta dan UGM digugat ke Pengadilan Negeri Solo.

Rep: Muhammad Noor Alfian Choir/ Red: Erik Purnama Putra



Gambar 2 Pemberitaan Ijazah Palsu pada Republika

"Konsekuensi hukumnya segala utang yang dibuat sebagai kepala negara yang hari ini sudah mencapai Rp 7.000 triliun kalau nanti terbukti, Rp 7.000 triliun kalau nanti terbukti palsu otomatis itu tanggung jawab pribadi. Itu konsekuensi logisnya," ucap Taufiq. Kemudian, pernyataan Taufiq tersebut dijadikan judul utama berita. Judul tersebut tidak sekadar hanya untuk clickbait semata, melainkan upaya media untuk menyampaikan keresahan dari sudut pandang yang lain. Judul berita *"Jika Ijazah Jokowi Palsu, Ia harus Menanggung Utang Rp 7.000 Triliun"* membawa pesan tersirat dampak sistemik akibat dari ijazah palsu Jokowi. Kecenderungan *framing* ini dipilih karena isu-isu moralitas tokoh politik apalagi seorang pemimpin negara sering kali mendapatkan sorotan lebih lebih tinggi

dibandingkan hanya menampilkan data statistik kaku. Dengan demikian, pemilihan Republika sebagai objek penelitian menarik bagi peneliti karena gaya *human-interest*-nya dalam membingkai isu sosiopolitik menonjolkan reaksi massa, dan konsekuensi dramatis, sehingga kontras dengan CNN Indonesia yang lebih menekankan sudut pandang institusional dan verifikatif.

Perbedaan bingkai antara CNN Indonesia dan Republika dapat dianalisis melalui beberapa dimensi. Struktur kepemilikan dan afiliasi institusional mempengaruhi kebijakan editorial suatu media. CNN Indonesia, sebagai bagian dari jaringan yang berlisensi internasional dan beroperasi di bawah grup media besar, memiliki standar editorial yang berorientasi pada praktik jurnalisme arus utama dan audiens nasional yang heterogen. Berbeda dengan CNN Indonesia, Republika dilahirkan dari komunitas Muslim dan memiliki basis pembaca dengan orientasi religius, cenderung mempertimbangkan sensitivitas nilai moral dan *human interest* dalam pemilihan sudut pandang pemberitaan. Perbedaan latar ideologi ini berimplikasi pada prioritas sumber data dalam proses liputan, bahasa yang digunakan, serta penempatan isu dalam menentukan *framing* (Habibie, 2018).

Framing atau pembingkai berita merupakan konsep sentral dalam studi komunikasi massa yang menjelaskan bagaimana media mengorganisasi dan menyajikan informasi untuk memberikan makna tertentu kepada audiens. Konsep ini menekankan bahwa realitas yang tampil di media bukanlah cerminan apa adanya, melainkan hasil seleksi, penonjolan, dan penafsiran tertentu oleh media. Dalam pemberitaan politik, *framing* menjadi sangat krusial karena dapat

memperkuat, melemahkan, atau menggeser legitimasi politik seorang aktor di mata masyarakat. Cara media memilih kata, sudut pandang, narasumber, dan konteks penyajian akan mempengaruhi apakah seorang tokoh dipersepsikan positif, negatif, atau netral oleh audiens. Oleh karena itu, *framing* tidak hanya berhubungan dengan bagaimana berita ditulis, tetapi juga terkait erat dengan kepentingan, ideologi, dan kebijakan redaksi media

Teori *framing* yang dikembangkan oleh Erving Goffman pada bukunya yang berjudul *Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience* dan kemudian disempurnakan oleh Robert M. Entman menunjukkan bahwa media tidak hanya melaporkan peristiwa, tetapi juga secara aktif membantu audiens menafsirkan makna peristiwa tersebut. Goffman memandang *frame* sebagai struktur kognitif yang membantu individu mengorganisasi pengalamannya dan menjawab pertanyaan “*Apa yang sedang terjadi di sini?*”, sehingga kerangka ini kemudian diadopsi dalam kajian media untuk menjelaskan bagaimana berita membentuk cara pandang khalayak. Robert M. Entman menyempurnakan gagasan ini dengan merumuskan bahwa *framing* dilakukan melalui empat fungsi utama, yaitu mendefinisikan masalah, mendiagnosis penyebab, membuat penilaian moral, dan menyarankan solusi. Proses ini dilakukan melalui pemilihan aspek-aspek tertentu dari realitas yang dipersepsikan dan membuatnya lebih menonjol dalam sebuah produk komunikasi (Entman, 1993).

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa CNN Indonesia dan Republika kerap membingkai isu yang sama secara berbeda, namun objek

kajiannya masih didominasi oleh isu sosial dan politik lain, bukan dugaan ijazah palsu Jokowi. Penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa dalam isu penutupan TikTok Shop, CNNIndonesia.com menggunakan model sintaksis yang menonjolkan aspek ekonomi melalui keluhan pedagang, sedangkan Republika.co.id lebih menggunakan *episodic framing* yang hanya berfokus pada peristiwa pada waktu tertentu agar lebih mudah dipahami khalayak (Putri & Qurniawati, 2024). Penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa dalam isu batas usia capres-cawapres, CNNIndonesia.com memilih untuk menonjolkan kekurangan dalam putusan hukum dan isu pelanggaran kode etik hakim, sementara media pembandingnya lebih mengangkat sisi pendukung pencalonan (Adilla, Irawan, & Suparto, 2024). Temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa framing media tidak hanya ditentukan oleh fakta peristiwa, tetapi juga oleh karakteristik media, ideologi, serta kebijakan redaksi dalam mengonstruksi realitas melalui pemilihan sudut pandang (*angle*) dan narasumber yang ditonjolkan.

Berdasarkan penelusuran penelitian yang ditemukan, masih terdapat celah kajian karena belum banyak studi yang secara spesifik membandingkan framing CNN Indonesia dan Republika pada kontroversi dugaan ijazah palsu Jokowi periode April–Mei 2025, terutama dengan menyoroti permainan diksi pada judul, susunan kalimat, dan penutup berita sebagai perangkat pembingkai makna. Di sinilah kebaruan penelitian ini terletak, yaitu pada pemilihan objek yang lebih mutakhir, isu yang sangat sensitif secara politik-hukum, serta fokus analisis yang tidak hanya melihat konten berita secara umum, tetapi juga bagaimana pilihan kata dan penekanan naratif membentuk kesan de-eskalasi, legitimasi, atau penajaman

konflik dalam benak khalayak. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan kajian framing yang selama ini lebih banyak membahas isu lain atau hanya berfokus pada satu media tertentu.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut, Bagaimana perbedaan *framing* pemberitaan Dugaan Ijazah Palsu Jokowi pada portal berita CNN Indonesia dan Republika pada periode April-Mei 2025?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perbedaan pembingkaiian berita Dugaan Ijazah Palsu Jokowi pada portal berita CNN Indonesia dan Republika pada periode April-Mei 2025.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah,

a. Manfaat Teoritis

1. Menggambarkan bagaimana realitas sosial dapat dibangun melalui pembingkaiian berita oleh pemberitaan media.
2. Menambah khazanah literatur komunikasi massa dengan studi kasus “Pembingkaiian Berita Dugaan Ijazah Palsu Jokowi” yang relatif baru dan relevan.

b. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi para wartawan di media *online* khususnya di portal berita tertentu agar mampu berintegritas dan bekerja secara profesional. Industri media juga dapat memanfaatkan jurnalis warga yang independen dalam menyampaikan informasi dan tidak dipengaruhi pihak tertentu.
2. Dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian lanjutan terhadap kajian dan pembahasan yang lebih mendalam dan lebih baik lagi di masa yang akan datang.